

LHP BPK Untuk Evaluasi Proyek Infrastruktur

SEMARANG - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menginginkan kualitas proyek infrastruktur adalah yang nomor satu. Untuk memastikan kualitas tersebut, selain menggandeng konsultan, Gubernur juga akan menggunakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai acuan.

"Saya akan mengajak konsultan dan akan melihat hari ini hasil evaluasi BPK juga," ungkap Gubernur kepada wartawan, kemarin.

Hanya saja, menurut Gubernur, untuk pekerjaan infrastruktur tahun pertama, sekarang ini, pemeriksaan dari BPK memang masih dilakukan dan belum selesai. Sehingga dirinya belum mendapatkan hasil pemeriksaannya. Sementara sekarang ini sudah berlanjut pada infrastruktur

tahun kedua.

Kalau hari ini dirinya bisa dapat hasilnya dari BPK, sebenarnya bisa disampaikan. "Tapi secara kualitatif tadi sudah saya sampaikan secara terbuka. Hai Bumiayu, siapa yang mengerjakan? Dan tadi tidak ada yang ngacung (angkat tangan, red)," katanya.

Pernyataan Gubernur itu sendiri disampaikan menyikapi selama ini banyak lelang proyek infrastruktur yang dlosor-dlosoran harga. Akibatnya, karena harga rendah, secara otomatis berpengaruh pada kualitas jalan.

Lebih lanjut juga disampaikan Gubernur, kalau rekanan dalam lelang dlosor-dlosoran, Dinas Bina Marga pasti sudah mengantisipasi. Selain memiliki pengalaman, juga sudah memiliki perhitungan.

"Jadi dlosorannya seberapa. Kalau

masih dalam batas yang wajar ya tidak apa-apa. Kecuali kalau nilai itu, sebut saja Rp 10 miliar, dia mengerjakan Rp 5 miliar, kira-kira kualitasnya juga tidak masuk akan. Maka proses ini harus kita pantau," tukasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga Jateng, Bambang NK menyatakan kalau pihaknya sudah adaantisipasi terkait dengan kemungkinan lelang pada dlosor-dlosoran.

Disampaikannya, sebagai gambaran kalau penawaran lelang ternyata dibawah 90 % dari nilai proyek, akan dilakukan penelitian dan pengecekan lebih mendalam, terkait keseriusan penawaran, kemampuan teknis dan keuangannya. Sebab, kalau nilainya rendah, pasti cenderung akan menurunkan kualitas bangunan. "Kalau nilai rendah, kan ada kecenderungan

untuk menyiasati kualitas bangunan. Jadi kita perhatikan benar nilai penawarannya juga," tukasnya.

Kepala Bidang Bina Teknik, Dinas Bina Marga Jateng Hanung Triyono menambahkan, pihaknya memiliki mekanisme tersendiri terkait kemungkinan penawaran lelang proyek yang dlosor-dlosoran.

Di Pokja, pihaknya akan melakukan pengecekan keseriusan penawaran yang diajukan rekanan. Bahkan juga akan dilakukan cek kemampuan teknis dan keuangannya.

"Itu kita ada mekanisme klarifikasinya. Kalau penawarannya jauh dari standar dan tidak logis, kita akan cek kemampuan teknis dan keuangannya. Karena kalau di bawah standar, pasti pada pelaksanaannya dia akan main-main," tukasnya. (udi/adv)